



**SEKRETARIAT  
DAERAH**

# **RENCANA KERJA 2025**

Rencana kerja Sekretariat Daerah  
Kabupaten Natuna



+123 456 7890



[www.setda.natunakab.go.id](http://www.setda.natunakab.go.id)

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman penting bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui dokumen ini, kami berharap dapat menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Dengan demikian, setiap rencana dan program yang diusulkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam penyusunannya, kami telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua aspirasi dan kebutuhan terakomodasi dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta mencapai visi dan misi Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera.

29 Juli 2024



## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun ranwal dan rancangan Renja. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari periode RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang mengusung tema *“Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera”*. Selain itu dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 yaitu : 1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan aspek Kebijakan, pengawasan dan proses evaluasi, 2).Kurangnya peahaman OPD dalam pelaksanaan delapan area perubahan, 3).Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- 18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud RENJA Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan RENJA ini adalah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dicapai.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### BAB V. PENUTUP

### LAMPIRAN

## BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telahaan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelauran keiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023

Evaluasi capaian kinerja 2023 dilakukan dengan maskud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil , kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana Pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbikan pelaksanaan rencana Pembangunan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 berdsarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026 , dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Program Tahun 2023

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelembagaan	65	75
	Nilai Laporan LKJIP	78.52	58.1
	Persentase Pelayanan Kedinasan kepala Daerah	100	100
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	63
	Persentase Realiasi Pelaksanaan Pembangunan	90	90.89
	Tingkat Inflasi Daerah	3.13	NA
Program Pemerintah dan Kesejahteraan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan	90	75
	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA	65	95
	Indeks Kualitas Kebijakan	81	38.54
	Persentase Kerjasama yang ditindak lanjuti	90	70
	Peningkatan Nilai LPPD	3.03	2.09

Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023, terdapat tiga (3) program dengan dua belas (12) indikator program. Dari dua belas indikator program enam diantaranya mencapai target, dan enam indikator lainnya belum mencapai target (lihat table 1).

Tabel 2. Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator	Target 2023	Capaian
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evluasi Kinerja PD	persentase realisasi kinerja perangkat daerah	85	84
2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1	1
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45	100
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase peningkatan BMD	80	80
6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	75
7	Pemeliharaan BMD penunjang ursan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarna prasarana	70	75
8	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH-WKDH	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang sesuai dengan kebutuhan	100	75
9	Kegiatan Penataan Organisasi	persentase perangkat daerah yang tata kelola baik	100	100
		persentase perangkat daerah yang tata laksana baik	100	100

10	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler terencana yang difasilitasi	85	80
11	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	100	100
12	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Diundangkan	81	71
13	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentasae Kerjasama yang di sepakati	90	100
14	Kegiatan Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	33
15	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	55	50
16	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	55	52
17	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	93.7
18	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3.6	53.74
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	14	58.98

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis , disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

SASARAN	INDIKATOR	Target Resnra					Realisasi		Proyeksi Capaian	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	59%	62%	65%	68%	94.82%	96.16%	95%	98%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	78	79.5	80	80	80	73.84	73.98	78	80
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	2.6	3.3	3.34	3.34	3.34	3.31	2.09	3.1	3.3
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.49	3.5	4.16	3.71	3.75	3.8

Realsisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut :

a. Realisasi Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA

Realisasi diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan bantuan dana pembinaan dan operasional oleh Pemerintah Daerah pada rumah ibadah dan TPQ/TPA/MDA. Metode pengukuran kinerja yaitu melalui formulasi perbandingan rumah ibadah atau TPQ/TPA/MDA yang aktif dan memiliki kepengurusan serta mendapatkan bantuan pembinaan dan dana operasional dengan jumlah rumah ibadah TPQ/TPA/MDA yang ada di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan data tahun 2022 jumlah rumah ibadah 285 mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 311 rumah ibadah (masjid, gereja, surau). Kenaikan peningkatan jumlah rumah ibadah mencapai 9%. Sementara jumlah TPQ/TPA/MDA justru mengalami penurunan 154 di tahun 2022 menurun di tahun 2023 menjadi 138 TPQ/TPA/MDA menurun sekitar 10.4%.

b. Nilai SAKIP Daerah

Target 76.15 realisasi 73.98 belum mencapai target. SAKIP dinilai dari 4 Komponen, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi Akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

1. Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi

2. Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahwa target kinerja realistik, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik.
3. Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time
4. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan.
5. Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.
6. Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas.

Tindak lanjut atas permasalahan dan kendala diatas dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja realisasi indikator adalah mengkoordinasikan bersama satkeholder dan jajaran pimpinan sekretariat daerah terkait rekomendasi evaluasi SAKIP. Kemudian menyusun langkah strategis pelaksanaan rekomendasi sesuai tanggungjawab dan wewenang unit kerja. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, dan mereview hasil pelaksanaan kinerja apakah sudah sesuai rencana atau masih ada kendala.

### c. Nilai EPPD

Realisasi indikator EPPD tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Natuna tahun 2020. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variable yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Target EPPD tahun 2023 adalah kategori sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian diperoleh nilai indeks EPPD adalah 2,09. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna masuk kategori berprestasi sedang (skala 1-2) dan belum tercapai target.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EPPD adalah sebagai berikut :

- Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampi memenuhi kualitas yang seharusnya;
- Adanya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
- Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta.
- Adanya perbedaan petunjuk teknispedoman penyusunan LPPD dan kertas Kerja Evaluator sehingga PD sulit menentukan data mana yang dipakai;

- Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung yang akan dibina;
- Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indoensia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Nilai ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 3.47 tercapai 3.71. Capaian nilai tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik dengan capaian 106,%.

Faktor Pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar pelayanan publik;
- Komitmen dari stakeholder dan ASN dalam memberikan pelayanan public yang prima;
- Adanya dukungan sumberdaya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan

terhadap visi misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu :

- a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi public atas hasil Pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ asset pemerintah daerah, kurangnya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurang intensnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku bermoral.

- c) Sinergitas dan koordinasi perumusan kebijakan kesejahteraan Masyarakat dan sosial

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran yang ada menyebabkan pemerataan kesjehteraan / distribusi pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial.

d) Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikor kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai penopang perekonomian daerah.

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

### **2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara racangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan rill Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table lampiran.

### **2.4. Penalaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat**

Dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan. Proses partisipatif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (msrenbang) ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah

diantara ditujukan ke Bagian Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Tata Pemerintahan. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.

**Tabel 4. Usulan Program dan kegiatan Dari Masyarakat**

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Catatan
<b>I</b>	<b>Pokok Pokok Pikiran DPRD</b>					
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesjehteraan Rakyat					
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid Al Huda Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
			Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid An Nur Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
<b>II</b>	<b>Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)</b>					
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesjehteraan Rakyat					
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Pengadaan Alquran untuk TPQ dan rumah Quran	Desa Kelanga	1 Paket	Usulan Kecamatan
2	Kegiat Administstrasi Tata Pemerinahan					
	2.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu Kelurahan dengan Pemberian Insentif sebesar Rp. 350.000,-/bulan	Kelurahan Ranai	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
	2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administarsi Kewilayah	Honor Kader Posyandu (Kader Posyandu Beringin Dan Bunda Pertiwi)	Kelurahan Ranai Dara	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Panggung Tenda	Desa Kelanga	Unit	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai kewenangan bagian umum

## BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kualitas rencana Pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Renstra juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, sinergi perencanaan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perenanaan satu tahun. Berikut ini adalah keterhubungan dan keselarasan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan Resntra Sekretariat Daerah Provinsi.

**Tabel 5. Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna**

<b>Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024</b>	<b>Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepri 2021-2026</b>	<b>Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026</b>
S.7. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional dan inovatif	S.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	S.2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
S.10. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	T.2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	T.2 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

### **3.2. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna 2025.**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2025 berfokus pada tiga hal yaitu :

- 1) Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah perumusan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu juga mengkoordinatori perangkat daerah terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
- 2) Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Meurmuskan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu perumusan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin Kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

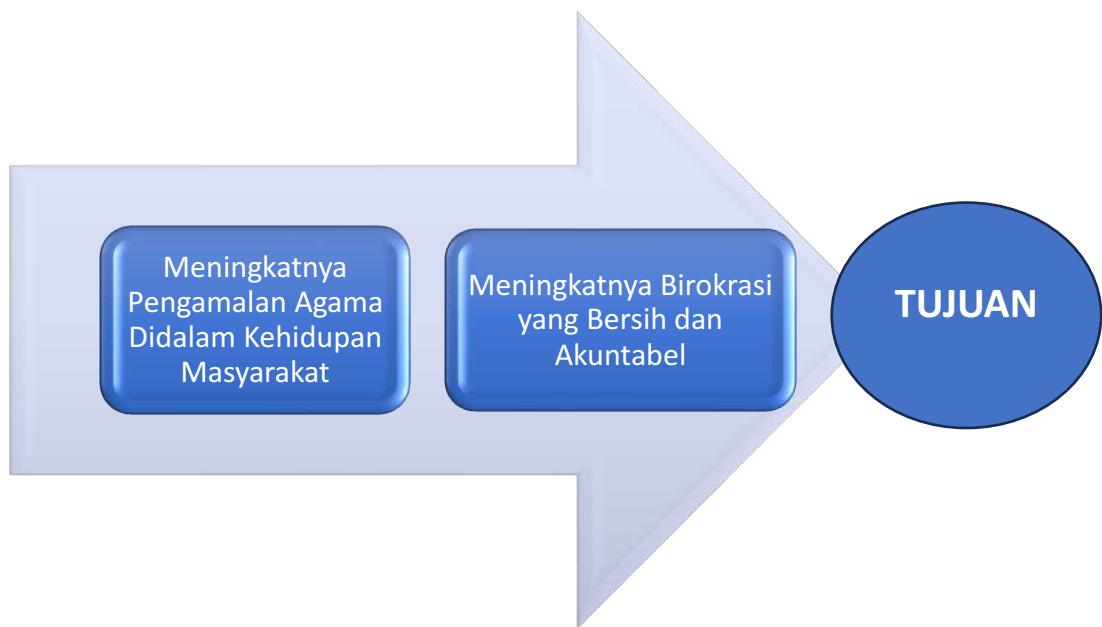
### **3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung mewujudkan misi 1. **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan sasaran Meningkatnya

pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yakni. Dan misi 6 ***Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas*** dengan sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demi terwujudkanya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2021-2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menetapkan 2 (dua) tujuan yang merupakan turunan dari sasaran misi pada RPJMD seperti yang terlihat pada gambar 1 (satu).

Tabel 1. Tujuan Resntra Sekretariat Daerah



Tujuan Pertama (T.1) yaitu Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah, misi pertama (1) *Akselarasai peningkatan kualitas sumber daya manusia*. Tujuan pertama (T.1) Sekretariat Daerah ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sasaran (S.1) yang ingin dicapai pada Tujuan ini adalah

Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah .

Tujuan kedua (T.2) yaitu Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah pada misi enam (6) Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun sasaran (S.2) yang ingin dicapai dari tujuan (2) Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan transparan. Yang menjadikan tolok ukur keberhasilan sasaran ini diukur dari tiga indikator yakni : 1). Dinilai dari nilai akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, 2). Dinilai dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam LPPD, 3). Dinilai dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
<b>Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat</b>	Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah	1. Persentase Pembinaan Lembaga Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	95%
<b>Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.</b>	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Nilai Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)	80 3.34 3.80

indikator sasaran mengalami perubahan target seperti indikator 1 dari 65% menjadi 95%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pada tahun 2022-2023 yang mencapai diatas target, sehingga dengan kondisi eksisting kinerja yang cukup bagus maka diperlukan perubahan target menyesuaikan hasil capaian kinerja sebelumnya. Kemudian indikator yang

juga mengalami perubahan target adalah indikator (4) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 3.49 target berubah menjadi 3.80. Hal ini juga sama dengan indikator sebelumnya bahwa hasil capaian tahun sebelumnya sudah melebih target sehingga diperlukan penyesuaian target berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas terkait perubahan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator	Target 2025 sebelum perubahan	Target 2025 setelah perubahan
Persentase Pembinaan Lembagaan Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	65%	95%
Nilai SAKIP Kabupaten	80	80
Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Darah (LPPD)	3.34	3.34
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.49	3.80

### 3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2025, maka pada tahun 2025 arah kebijakan program kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll.

Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas kebijakan (indeks kualitas kebijakan), peningkatan tatalaksana kelembagaan (indeks kelembagaan), optimalisasi aplikasi SISMONKAB dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan, Peningkatan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (indeks PBJ), Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.

2. Peningkatan Ekonomi Daerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Meretorasi manjemen BUMD sehingga bisa bertumbuh dan memberikan profit bagi daerah, dan pengendalian inflasi melalui pegelaran pasar murah, memperluas pasar produk UMKM lokal melalui kebijakan Kerjasama antar daerah dan pihak swasta.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemudaan sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan pendidikan iman dan taqwa serta Pendidikan tinggi. strateginya yang akan ditempuh untuk

peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Kemudian beasiswa bagi anak anak daerah untuk bisa menempuh Pendidikan tinggi di Universitas melalui program Kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan, Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi paegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tebel dibawah ini.

**Tabel 6. Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah**

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2025
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Mental Spritual	Persentase Penngkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	96%
	Meingkatnya Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah yang terpenuhi Indikator LPPD	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Kerjasama yang ditindaklanjuti	90%
Program Perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan kebijakan Perekonomian	Nilai Indeks PBJ	78
		Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90%
		Tingkat Inflasi Daerah	2.85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan	70
		Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	77
	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan dan layanan pimpinan	Layanan Dukungan Adminsitrasii Kesekretariatan yang sesuai SOP	90%
		Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	100%

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya :

- 1) Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta Resntra Sekretariat Daerah 2022-2026.
- 2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi.
- 3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
- 4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah
- 5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Sekretariat Daerah
- 6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 3 program dan 18 kegiatan dan 45 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp. **65,162,892,798** yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2023 disajikan dalam tabel pada lampiran.

**Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan  
Perkiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Natuna**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
03	Sekretariat Daerah								7,057,675,885	7,025,208,845						
03.06	<u>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>								7,057,675,885	7,025,208,845						
6	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								7,057,675,885	7,025,208,845						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								7,057,675,885	7,025,208,845						
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	3			1,787,505,635	1,787,505,635						
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	1,787,505,635	1,787,505,635						
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1,787,505,635	1,787,505,635		Sekretariat Daerah				
	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga (PSDKU)			Kabupaten Natuna				2	500,000,000	500,000,000						
	Kegiatan dan Operasional Islamic Center NU			Kecamatan Bunguran Timur				1	988,074,835	988,074,835						
	Kegiatan Safari Ramadhan Pemkab			Kabupaten Natuna				1	249,431,000	249,431,000						
	Pengadaan AC			Kecamatan Bunguran Timur				2	22,000,000	22,000,000						
	Pengadaan Gerobak Dorong			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000						
	Pengadaan Kipas Angin Kamar			Kecamatan Bunguran Timur				2	21,000,000	21,000,000						
	Pengadaan Mesin Potong Rumput			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000						
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000						
	Pengadaan Tangga			Kecamatan Bunguran Timur				1	7,000,000	7,000,000						
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat		PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN TPO/TPA/MDA	3			5,270,170,250	5,237,703,210						
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	60,000,000	0						

## PERANGKAT DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/DUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Perwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakasan, Kearsipan, Tanah dan Lahan	1	50,000,000	0		Sekretariat Daerah				
	BANTUAN AL-QURAN SETIAP GURU-GURU NGAJU AL-QURAN RUMAHAN DAN TPA DESA KELANGA			Desa Kelanga				10	50,000,000	0						
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	5,220,170,250	5,237,703,210						
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5,220,170,250	5,237,703,210		Sekretariat Daerah				
	Bantuan Hibah Kelembagaan Rumah Ibadahm TPG			Kabupaten Natuna				1	1,000,000,000	1,000,000,000						
	Kegiatan PHRI			Kabupaten Natuna				1	250,000,000	250,000,000						
	Lanjutan Pembangunan Gereja HKBP			Kecamatan Bunguran Timur				1	500,000,000	300,000,000						
	MTQ Kabupaten			Kabupaten Natuna				1	1,000,000,000	1,000,000,000						
	MTQH Provinsi			Kabupaten Natuna				1	682,457,049	1,000,000,000						
	Pelatihan Imam dan Khatib			Kabupaten Natuna				1	370,703,201	370,703,210						
	Penambahan Sarana/Prasarana Masjid Al-Gaum Desa Binjai			Desa Binjai				1	100,000,000	100,000,000						
	Pengadaan Karpet Masjid/surau			Kabupaten Natuna				1	450,000,000	450,000,000						
	Pengadaan Kipas Angin Dinding			Kecamatan Bunguran Timur				1	21,000,000	21,000,000						
	Pengadaan Kipas Angin Dinding			Kecamatan Bunguran Timur				1	21,000,000	21,000,000						
	Pengadaan kipas angin mesjid (model embun)			Kecamatan Bunguran Timur				1	80,000,000	80,000,000						
	Pengadaan Lampu Hias Taman Kawasan Masjid Agung Natuna			Kecamatan Bunguran Timur				1	100,000,000	0						
	Pengadaan Lampu LED Tulisan berjalan			Kecamatan Bunguran Timur				1	30,000,000	30,000,000						
	Pengadaan Scrolling			Kecamatan Bunguran Timur				1	40,000,000	40,000,000						
	Pengadaan Sound Sistem			Kabupaten Natuna				1	50,000,000	50,000,000						
	Pengadaan Vacum Cleaner			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000						
	Penyeleenggaraan Haji, Manasik, pemberangkatan dan pemulangan			Kecamatan Bunguran Timur				1	500,000,000	500,000,000						
JUMLAH									7,057,675,885	7,025,208,845						

## PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03.	Sekretariat Daerah								1,841,750,000	1,819,750,000						
03.05.	<u><b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b></u>								1,841,750,000	1,819,750,000						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,841,750,000	1,819,750,000						
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								1,841,750,000	1,819,750,000						
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	78.65			413,000,000	391,000,000						
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	90	413,000,000	391,000,000						
4.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	335,000,000	335,000,000		Sekretariat Daerah				
	Pengadaan Komputer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35,000,000	35,000,000						
	Pengordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	300,000,000	300,000,000						
4.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihas Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktihas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	78,000,000	56,000,000		Sekretariat Daerah				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
111	123	131	141	151	161	171	181	191	110	111	112	113				
							Capaihan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	0						
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	8,000,000	8,000,000						
	Pengoordinasian Pelaksanaan evaluasi kinerja dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000						
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTRASE REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	90			1,428,750,000	1,428,750,000						
4.01.03.2 02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Persentase Capaihan Kinerja Pelaksanaan Admin stres Pembangunan	90	1,428,750,000	1,428,750,000						
4.01.03.2 02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	629,000,000	629,000,000	Sekretariat Daerah					
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	17,000,000	17,000,000						
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	12,000,000	12,000,000						
	Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				1	600,000,000	600,000,000						
4.01.03.2 02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	799,750,000	799,750,000	Sekretariat Daerah					
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03	Sekretariat Daerah								840,000,000	741,789,758						
03.04.	<u><b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b></u>								840,000,000	741,789,758						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								840,000,000	741,789,758						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								840,000,000	741,789,758						
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		TINGKAT INFLASI DAERAH	2,94			840,000,000	741,789,758						
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Persentase Kebijakan Perekonomian	65	565,000,000	506,183,172						
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	245,000,000	270,596,586		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modul Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	15,000,000	15,000,000						
	Belanja Modul Smart TV Display			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	20,000,000						
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kabupaten Natuna				1	210,000,000	235,596,586						
4.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2	320,000,000	235,596,586		Sekretariat Daerah				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							dan Distribusi Perekonomian									
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Kabupaten Natuna			1	320,000,000	235,596,586							
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	65	275,000,000	235,596,586						
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan	1	275,000,000	235,596,586		Sekretariat Daerah				
	Pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan			Kabupaten Natuna			1	275,000,000	235,596,586							
JUMLAH									840,000,000	741,789,758						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PACU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03	Sekretariat Daerah								751,000,000	724,000,000						
03.02.	<u>BAKAN HUKUM</u>								751,000,000	724,000,000						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								751,000,000	724,000,000						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								751,000,000	724,000,000						
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	86			751,000,000	724,000,000						
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Persentase Produk hukum yang diundangkan	74	751,000,000	724,000,000						
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540	357,000,000	350,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modal Mesin Scanner		Kecamatan Bunguran Timur					1	7,000,000	0						
	Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya.		Kabupaten Natuna					500	350,000,000	350,000,000						
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	250,000,000	250,000,000		Sekretariat Daerah				
	Fasilitasi Pelayanan bantuan hukum, Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Hukum		Kabupaten Natuna					2	250,000,000	250,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITY DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	435	144,000,000	124,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modal Laptop			Kabupaten Natuna				1	40,000,000	20,000,000						
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	4,000,000	4,000,000						
	Melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah			Kecamatan Bunguran Timur				400	100,000,000	100,000,000						
JUMLAH									751,000,000	724,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03.	Sekretariat Daerah								572,001,000	572,000,635						
0310	<u>BAGIAN KERJASAMA</u>								572,001,000	572,000,635						
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								572,001,000	572,000,635						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								572,001,000	572,000,635						
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI	90			572,001,000	572,000,635						
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	572,001,000	572,000,635						
4.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	374,217,651	457,600,581		Sekretariat Daerah				
	Fasilitasi dan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitasi kerja sama dalam negeri			Kabupaten Natuna				10	374,217,651	457,600,581						
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	197,783,349	114,400,054		Sekretariat Daerah				
	Pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri			Kabupaten Natuna				1	197,783,349	114,400,054						
JUMLAH									572,001,000	572,000,635						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03.	Sekretariat Daerah								1,167,481,600	1,223,924,888						
03.03.	<u>BAGIAN ORGANISASI</u>								1,167,481,600	1,223,924,888						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,167,481,600	1,223,924,888						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1,167,481,600	1,223,924,888						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KELEMBAGAAN	70			1,167,481,600	1,223,924,888						
4.01.01.213	Penataan Organisasi						Percentase Parangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	770,181,600	775,903,244						
4.01.01.213.D1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	384,073,182	409,434,004		Sekretariat Daerah				
	Pengkoordinasian Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Kabupaten Natuna				47	384,073,182	409,434,004						
4.01.01.213.D3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						Jumlah Dokumen Peningkataan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	235,000,000	215,360,822		Sekretariat Daerah				
	Belanja Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	0						
	Belanja Modal Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	0						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAOU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Pengadaan laptop			Kabupaten Natura				2	40,000,000	40,000,000						
	Pengoordianasi dan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Kabupaten Natura				37	150,000,000	175,360,822						
4.01.01.213.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	151,108,418	151,108,418		Sekretariat Daerah				
	Pengoordianasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Kabupaten Natura				47	151,108,418	151,108,418						
4.01.01.213	Penataan Organisasi						Percentase Perangkat Daerah Yang Teta Laksananya Baik	100	397,300,000	448,021,644						
4.01.01.213.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	247,300,000	272,660,822		Sekretariat Daerah				
	Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Natura				73	247,300,000	272,660,822						
4.01.01.213.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	150,000,000	175,360,822		Sekretariat Daerah				
	Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Natura				45	150,000,000	175,360,822						
JUMLAH									1,167,481,600	1,223,924,888						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03	Sekretariat Daerah								983,000,000	1,728,000,000						
03.09.	<u>BAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</u>								983,000,000	1,728,000,000						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								983,000,000	1,728,000,000						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								983,000,000	1,728,000,000						
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA	59			983,000,000	1,728,000,000						
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Percentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetisi	3.7	521,000,000	1,293,000,000						
4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	121,000,000	93,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC)			Kecamatan Bunguran Timur				2	16,000,000	8,000,000						
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	20,000,000	20,000,000						
	Belanja Modal Komputer PC All in One			Kecamatan Bunguran Timur				3	60,000,000	60,000,000						
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				5	25,000,000	5,000,000						
4.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Orang yang Mengikuti	30	400,000,000	1,200,000,000		Sekretariat Daerah				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAQU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				50	400,000,000	400,000,000						
	Pelaksanaan Bimtek PBJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000						
	Pelaksanaan Bimtek PBJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000						
4.01.03.2.03.	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa						Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	16	462,000,000	435,000,000						
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	462,000,000	435,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modal Komputer			Kecamatan Bunguran Timur				2	40,000,000	20,000,000						
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	12,000,000	10,000,000						
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				2	10,000,000	5,000,000						
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				4	400,000,000	400,000,000						
JUMLAH									983,000,000	1,728,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03	Sekretariat Daerah								1,745,000,000	16,517,083,954						
03.08.	<u>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</u>								1,745,000,000	16,517,083,954						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,745,000,000	16,517,083,954						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1,745,000,000	16,517,083,954						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	100			1,745,000,000	16,517,083,954						
4.01.01.214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Persentase Agenda Protokoler Terencana yang terfasilitasi	88	1,745,000,000	16,517,083,954						
4.01.01.214.01.	Fasilitasi Keprotokolan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	1,180,000,000	6,957,627,675		Sekretariat Daerah				
	Belanja Moda' Laptop			Kabupaten Natuna				12	50,000,000	1,381,525,535						
	Belanja Modal Printer			Kabupaten Natuna				12	80,000,000	1,381,525,535						
	Belanja souvenir			Kabupaten Natuna				12	200,000,000	1,381,525,535						
	Pakaian Dinas Lapangan			Kabupaten Natuna				12	200,000,000	1,381,525,535						
	Revarasi Ruangan Kantor			Kabupaten Natuna				12	500,000,000	1,381,525,535						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITY DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Reversi Ruangan Kantor			Kabupaten Natuna				12	150,000,000	150,000,000						
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	220,000,000	1,628,845,836		Sekretariat Daerah				
	Belanja Alat Perekam dan Headphone			Kabupaten Natuna				12	100,000,000	407,211,459						
	Belanja laptop			Kabupaten Natuna				12	50,000,000	407,211,459						
	Belanja Modem Komputer			Kabupaten Natuna				12	40,000,000	407,211,459						
	Belanja printer			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	407,211,459						
4.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	345,000,000	7,930,610,443		Sekretariat Daerah				
	Belanja HP iPhone			Kabupaten Natuna				12	25,000,000	1,132,944,349						
	Belanja Hp OPPO			Kabupaten Natuna				12	20,000,000	1,132,944,349						
	Belanja Kamera			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	1,132,944,349						
	Belanja Lensa Kamera			Kabupaten Natuna				12	55,000,000	1,132,944,349						
	Belanja Modem Laptop			Kabupaten Natuna				12	75,000,000	1,132,944,349						
	Belanja Printer			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	1,132,944,349						
	Belanja TV Smart			Kabupaten Natuna				12	60,000,000	1,132,944,349						
JUMLAH									1,745,000,000	16,517,083,954						

## PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TAROET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03.	Sekretariat Daerah								49,665,659,462	51,355,473,122						
03.07	BAGIAN UMUM								49,665,659,462	51,355,473,122						
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								49,665,659,462	51,355,473,122						
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								49,665,659,462	51,355,473,122						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			49,665,659,462	51,355,473,122						
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	19,669,441,893	24,325,148,587						
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	19,669,441,893	24,325,148,587		Sekretariat Daerah				
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bunguran Timur				150	19,669,441,893	24,325,148,587						
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah						Percentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	55	147,009,364	142,500,000						
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Keangkupannya						Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Keangkupannya	6	147,009,364	142,500,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Pakaian Adat Daerah KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				36	5,535,000	7,500,000						
	Belanja Pakaian Batik Tradisional KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				3	4,800,000	7,500,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TAROET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Belanja Pakaiian Dinas Harian (PDH) KDH/KWDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur					6	10,500,000	7,500,000					
	Belanja Pakaiian Dinas Upacara (PDU) KDH/KWDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur					2	6,600,000	7,500,000					
	Belanja Pakaiian Sipil Harian (PSH) KDH/KWDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur					5	10,000,000	7,500,000					
	Belanja Pakaiian Sipil Harian (PSH) Lengang Panjang			Kecamatan Bunguran Timur					5	11,000,000	7,500,000					
	Belanja Pakaiian Sipil Lengkap KDH/KWDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur					3	14,400,000	7,500,000					
	Penyediaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kecamatan Bunguran Timur					6	81,174,364	90,000,000					
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	6,393,716,179	5,057,184,249						
4 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	730,000,000	725,000,000	Sekretariat Daerah					
	Belanja Alat bahan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor, gedung sri sindut, lampu jalan kantor bupati			Kecamatan Bunguran Timur				6	305,000,000	300,000,000						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kecamatan Bunguran Timur				12	425,000,000	425,000,000						
4 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	447,664,249	292,664,249	Sekretariat Daerah					
	Belanja Alat Tulis Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				1	180,000,000	100,000,000						
	PENGADAAN PANGGUNG TENDA DESA KELANGA			Desa Kelanga				2	75,000,000	0						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
1.1	1.2.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13				
	Pengadaan Peralatan dan Perangkapkan Kantor			Kabupaten Natuna					5	192,664,249	192,664,249					
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12	880,000,000	80,000,000		Sekretariat Daerah			
	Belanja Bahan Bahan Kebersihan gedung kantor Bupati, gedung sri sindut, gedung wanita.			Kecamatan Bunguram Timur					3	80,000,000	30,000,000					
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain (Jasa Kebersihan)			Kecamatan Bunguram Timur					1	800,000,000	30,000,000					
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		14	479,757,000	198,500,000		Sekretariat Daerah			
	Belanja Cetak Kalender cetak buku agenda, cetak kartu jambang gurude, cetak map Bupati Map Bagian Cetak amplop, cetak buku disposisi, cetak cendra mata, cetak foto KDH WKDH			Kecamatan Bunguram Timur					9	479,757,000	198,500,000					
4.01.01.2.06.09	Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	3,858,294,930	3,781,000,000		Sekretariat Daerah			
	Belanja Blimbingan Teknis			Kecamatan Bunguram Timur					10	130,000,000	120,000,000					
	Belanja Makan Minum Rapat			Kecamatan Bunguram Timur					1000	222,000,000	200,000,000					
	Makan Minum Jamuan tamu dan tamu dimpin			Kabupaten Natuna					10	1,461,000,000	1,461,000,000					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar daerah dan Dalam Daerah)			Kabupaten Natuna					301	2,043,294,930	2,000,000,000					
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		80	5,349,200,000	3,525,000,000					
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		4	1,000,000,000	1,000,000,000		Sekretariat Daerah			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							Jabatan yang Disediakan									
	Belanja modal Kendaraan dinas roda empat Asisten			Kecamatan Bunguran Timur				1	300,000,000	300,000,000						
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat KDH/WKDH			Kecamatan Bunguran Timur				1	700,000,000	700,000,000						
4.01.03.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	745,000,000	745,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja modal bus mini untuk temu daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	300,000,000	300,000,000						
	Belanja modal kendaraan dinas roda dua			Kabupaten Natuna				1	20,000,000	20,000,000						
	Belanja Modal Mobil Truck			Kecamatan Bunguran Timur				1	250,000,000	250,000,000						
	Kendaraan dinas operasional Pick Up			Kabupaten Natuna				1	175,000,000	175,000,000						
4.01.03.2.07.05	Pengadaan Mebel:						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	637,000,000	250,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Lemari Arsip Besi			Kecamatan Bunguran Timur				7	52,000,000	50,000,000						
	Belanja Model kursi rapat			Kecamatan Bunguran Timur				500	275,000,000	50,000,000						
	Partisi Meja Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				15	225,000,000	50,000,000						
	Pengadaan Kursi kerja staf			Kecamatan Bunguran Timur				50	175,000,000	50,000,000						
	Pengadaan Kursi Plastik			Kecamatan Bunguran Timur				500	110,000,000	50,000,000						
4.01.03.2.07.05.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1,496,500,000	505,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split)			Kecamatan Bunguran Timur				10	100,000,000	50,000,000						
	Belanja modal alat perekam CCTV			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000						
	Belanja modal penghancur kertas			Kecamatan Bunguran Timur				5	35,000,000	35,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEO	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
4.01.01.2.07.01	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Pengadaan Komputer PC ALL IN ONE			Kecamatan Bunguran Timur					10	235,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Kursi Plastik Masyarakat Kp. Air Raya			Kelurahan Serasan					1	100,000,000	100,000,000					
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur					10	250,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur					10	250,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur					10	80,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur					10	85,000,000	50,000,000					
	Pengadaan TV Display + Standing Braket			Kecamatan Bunguran Timur					14	311,500,000	20,000,000					
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		5	730,000,000	500,000,000		Sekretariat Daerah			
	Belanja modal rampel tenda			Kecamatan Bunguran Timur					1	75,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Pelapon tenda			Kecamatan Bunguran Timur					1	40,000,000	50,000,000					
	Pengadaan rampel dan Pelapon Tenda Kerucut			Kecamatan Bunguran Timur					4	320,000,000	150,000,000					
	Pengadaan rampel Gedung Kantor Bupati (Non Tiang)			Kecamatan Bunguran Timur					1	40,000,000	50,000,000					
	Pengadaan Rempel Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur					8	40,000,000	50,000,000					
	Pengadaan sarung kursi			Kecamatan Bunguran Timur					500	100,000,000	50,000,000					
	Pengadaan terpal tenda			Kecamatan Bunguran Timur					1	50,000,000	50,000,000					
	Pengadaan rampel gedung dan tiang Gedung Sri Srdit			Kecamatan Bunguran Timur					2	65,000,000	50,000,000					
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	440,700,000	525,000,000		Sekretariat Daerah			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Jasa tagihan Istri-K dan air			Kabupaten Natuna				2	115,700,000	150,000,000						
	Belanja Sewa Rumah Singgah			Kabupaten Natuna				1	250,000,000	300,000,000						
	Pengadaan Partisipasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bunguran Timur				1	75,000,000	75,000,000						
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	8,254,550,288	8,244,550,288						
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Meryurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Meryurat	12	120,000,000	110,000,000		Sekretariat Daerah				
	Benda pos materai			Kecamatan Bunguran Timur				1	60,000,000	50,000,000						
	Penyediaan Jasa Surat Meryurat			Kabupaten Natuna				12	60,000,000	60,000,000						
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,925,000,000	1,925,000,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Telepon			Kecamatan Bunguran Timur				1	55,000,000	55,000,000						
	Tagihan Air			Kecamatan Bunguran Timur				1	170,000,000	170,000,000						
	Tagihan Listrik			Kecamatan Bunguran Timur				1	1,700,000,000	1,700,000,000						
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,209,550,288	4,209,550,288		Sekretariat Daerah				
	Bayar Premi Asuransi Kecelakaan Kerja			Kecamatan Bunguran Timur				1	12,976,200	12,976,200						
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pelayanan Umum			Kecamatan Bunguran Timur				562	772,800,000	772,800,000						
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tenggara			Kecamatan Bunguran Timur				1	280,000,000	280,000,000						
	Belanja tenaga pelayanan petugas rumah singgah Batam			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	30,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
	Honorarium supir KDH/WD/KDH di Ranal, Batam dan Jakarta			Kabupaten Natuna				72	180,000,000	180,000,000						
	Jasa tenaga administrasi (Tenaga Pendamping pengelolaan, staf PPTK, PTT)			Kecamatan Bunguran Timur				1	2,701,280,000	2,701,280,000						
	Premi Asuransi kematian			Kecamatan Bunguran Timur				1	16,221,608	16,221,608						
	Premi Asuransi Kesehatan			Kecamatan Bunguran Timur				1	216,272,480	216,272,480						
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	6,128,600,000	6,389,600,000						
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepengan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlizinannya	41	4,788,000,000	5,094,000,000	Sekretariat Daerah					
	Belanja Alat Tawra MV Indra Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	5,000,000	5,000,000						
	Belanja Alat Kebersihan MV Indra Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	10,000,000	10,000,000						
	Belanja Bahan Bakar dan pelumas			Kabupaten Natuna				1	2,330,000,000	2,330,000,000						
	Belanja Jasa Operator Kapal			Kecamatan Bunguran Timur				120	522,000,000	522,000,000						
	Belanja Modai perengkap Kapal MV IP			Kabupaten Natuna				26	204,000,000	210,000,000						
	Belanja pajak clearance kendaraan dinas dan mv indra perkasa			Kabupaten Natuna				1	150,000,000	150,000,000						
	Belanja Paket Pengiriman (Air/Minyak)			Kecamatan Bunguran Timur				1	37,000,000	37,000,000						
	Belanja Pemeliharaan alet angkutan apung bermotor			Kabupaten Natuna				1	500,000,000	500,000,000						
	Belanja pemeliharaan alet keselamatan Kapal MV IP			Kabupaten Natuna				1	60,000,000	60,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEO	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			Kabupaten Natura				1	300,000,000	300,000,000						
	Belanja suku cadang Kendaraan Dinas dan MV Indra Perkasa			Kecamatan Sunguran Timur				1	670,000,000	670,000,000						
4.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	842,100,000	602,100,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja bahan baku dan pelumas			Kecamatan Sunguran Timur				1	315,000,000	275,000,000						
	Belanja jasa teknisi mekanik dan listrik			Kecamatan Sunguran Timur				12	38,000,000	38,000,000						
	Belanja Pemeliharaan mesin genset			Kecamatan Sunguran Timur				1	100,000,000	100,000,000						
	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Daerah			Kecamatan Sunguran Timur				1	50,000,000	50,000,000						
	Isi Ulang Gas LPG 12 Kg			Kecamatan Sunguran Timur				100	27,500,000	27,500,000						
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Kecamatan Sunguran Timur				24	33,600,000	33,600,000						
	Pemeliharaan AC			Kecamatan Sunguran Timur				1	80,000,000	80,000,000						
4.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D-rehabilitasi	4	898,580,000	693,580,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja pemeliharaan Gedung kantor Bupati			Kecamatan Sunguran Timur				1	81,740,000	81,740,000						
	Belanja Peralatan dan Periengkapan tamam Kantor Bupati			Kecamatan Sunguran Timur				1	30,000,000	25,000,000						
	Pemeliharaan gedung sti sri sindut			Kecamatan Sunguran Timur				1	70,028,000	70,028,000						
	Pemeliharaan Gedung Dekrasnasda			Kecamatan Sunguran Timur				1	50,020,000	50,020,000						
	Pemeliharaan Gedung Wanita			Kecamatan Sunguran Timur				1	50,508,000	50,508,000						
	Pemeliharaan Pagar Belakang Kantor Bupati			Kecamatan Sunguran Timur				143	34,892,000	34,892,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Pembelahan taman Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				144	35,136,000	35,136,000						
	Pengecatan dinding teting dan tulisan Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				205	50,020,000	50,020,000						
	Pengecatan Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	195,200,000	195,200,000						
	Pengecatan Landmark Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				145	35,380,000	35,380,000						
	Pengecatan Masjid Bukit Arai			Kecamatan Bunguran Timur				1	50,508,000	50,508,000						
	Persitka Satuan Arit			Kecamatan Bunguran Timur				62	15,128,000	15,128,000						
4.01.01.211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Percentase Penyelenggaraan Admin stras: Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	100	5,723,081,740	5,871,450,000						
4.01.01.211.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1,717,466,000	1,717,466,000		Sekretariat Daerah				
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	1,717,466,000	1,717,466,000						
4.01.01.211.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	4,005,615,740	3,953,884,000		Sekretariat Daerah				
	Belanja Jasa akomodasi Tamu			Kabupaten Natuna				1	200,000,000	200,000,000						
	Belanja Makan dan Minum Jemuan Tamu kunjungan kerja /inspeksi KDH/WKDH			Kabupaten Natuna				7	700,000,000	700,000,000						
	Belanja makan dan minum jemuan tamu peningkatan operasional teknis Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				8	700,000,000	700,000,000						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	Belanja makan dan minum tahanan			Kabupaten Natuna				1	249,984,000	249,984,000						
	Belanja Perjalanan Dinas Basa			Kabupaten Natuna				56	863,109,040	800,000,000						
	Belanja sewa kendaraan air kegiatan kunjungan KDH WKDH			Kabupaten Natuna				12	54,000,000	54,000,000						
	Honorium Tim Penasehat Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				600	900,000,000	900,000,000						
	Perjalanan dinas luar daerah pihak ketiga			Kabupaten Natuna				30	338,522,700	350,000,000						
JUMLAH									49,665,659,462	51,365,473,122						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
03	Sekretariat Daerah								1,189,324,851	1,189,324,851						
03.01	<u><b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b></u>								1,189,324,851	1,189,324,851						
4	<u><b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b></u>								1,189,324,851	1,189,324,851						
4.01	<u><b>SEKRETARIAT DAERAH</b></u>								1,189,324,851	1,189,324,851						
4.01.02.	<u><b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b></u>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PENINGKATAN NILAI LPPD	100			1,189,324,851	1,189,324,851						
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	1,189,324,851	1,189,324,851						
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	736,850,945	736,850,945		Sekretariat Daerah				
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan			Kabupaten Natuna				1	736,850,945	736,850,945						
4.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	392,473,906	392,473,906		Sekretariat Daerah				
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			Kabupaten Natuna				1	392,473,906	392,473,906						
4.01.02.2.01.03.	Fasilitas: Pelaksanaan Otonomi Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	1	60,000,000	60,000,000		Sekretariat Daerah				

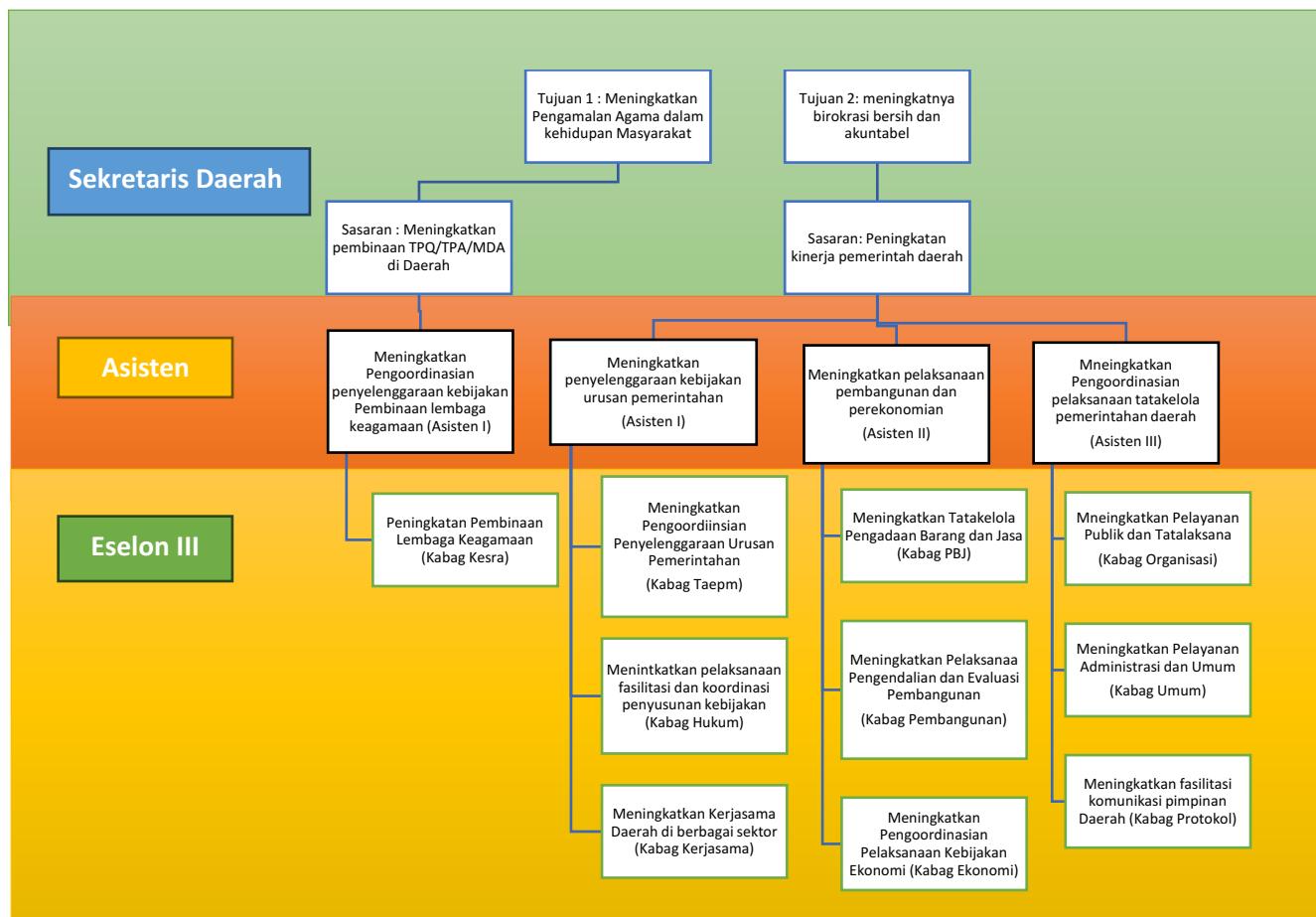
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAOU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH				
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT									
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
							Otonomi Daerah									
	Belanja Modal Computer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35,000,000	35,000,000						
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25,000,000	25,000,000						
JUMLAH									1,189,324,851	1,189,324,851						

## 4.2. Cascading dan Crosscutting

Cascading dan crosscutting merupakan dua konsep penting dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Keduanya saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Cascading merupakan proses penjabaran tujuan strategis dari tingkat atas (visi, misi, tujuan) ke tingkat yang lebih operasional (program dan kegiatan). Dengan kata lain, cascading adalah proses menerjemahkan tujuan besar menjadi tindakan nyata di lapangan.

### Cascading Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna



Crosscutting merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai isu tematik atau lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, isu gender, lingkungan hidup, atau pemberdayaan masyarakat dapat menjadi crosscutting issue yang perlu diperhatikan dalam setiap program. Untuk Sekretariat Daerah yang menjadi crosscutting isu adalah Pelaksanaan Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang terintegrasai ke dalam tiga program yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Untuk lebih jelas bagaimana crosscutting isu dapat dilihat pada table dibawah ini.

*Tabel Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna*

Tujuan Utama	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Strategi/arah kebijakan	Unit Kolaborasi
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Good Government)	Meningkatnya Nilai SAKIP Daerah	Melakukan fasilitasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah, reformasi birokrasi, fasilitasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyerapan anggaran pembangunan, pengukuran kinerja dan penyuksesan	Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda
		Meningkatnya Perolehan nilai LPPD	Penguatan dan peningkatan kualitas perencanaan daerah, peningkatan kualitas pelaksanaan, Peningkatan keterbukaan dan partisipasi publik, peningkatan kualitas data dan informasi, penguatan koordinasi dan kolaborasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Kerjasama, Bagian PBJ, OPD Pengampu indikator LPPD, Bappeda.
		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi berbasis online, keterbukaan informasi publik, membangun pusat pengaduan online, Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM bidang Pelayanan,	Bagian Organisasi, Bagian Protokol, Bagian Umum, Ombudsman,
Meningkatnya Pengmalan Nilai Agama di Tengah Masyarakat	Meningkatkan Pembinaan terhadap lembaga keagamaan (Rumah Ibadah, TPQ, MDA)	Percentase Pembinaan terhadap rumah ibadah (Masjid, TPQ dan MDA)	Pemberian bantuan dana operasional bagi lembaga keagamaan, dana bantuan guru ngaji, Pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah/TPQ/TPA/MDA, Lomba TPQ Berprestasi, monitoring dan evaluasi kinerja TPQ/TPA/MDA	Bagian Kesejahteraan rakyat, Lembaga Keagamaan lainnya.

## BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Dalam penutup dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Rencana ini merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan rencana kerja ini akan menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bahwa semua tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Natuna dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

- 1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
- 3) Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini. Semoga rencana ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna